



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**  
**BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU**  
**HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN**  
**BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN**  
**KEAMANAN HASIL PERIKANAN BANJARMASIN**

JALAN A.YANI KM 29,42 GUNTING MANGGIS, BANJARBARU 70724  
TELEPON (0511) 4783155, FAKSIMILE (0511) 4783546  
LAMAN [www.kkp.go.id/bkipmbanjarmasin](http://www.kkp.go.id/bkipmbanjarmasin) SUREL [bkikls2bjm@yahoo.com](mailto:bkikls2bjm@yahoo.com)

Yth.Sekretaris Badan PPMHKP  
Cq. Ketua Tim Kerja Pengolahan Kinerja  
Jakarta

**SURAT PENGANTAR**  
**NOMOR B.95/BKIPM.BJM/TU.210/I/2025**

No.	Naskah Dinas yang Dikirimkan	Banyaknya	Keterangan
1.	Laporan Kinerja Tahunan Tahun 2024	1 (satu) Berkas	Untuk dipergunakan sebagai bahan laporan.

Penerima  
Nama Jabatan

Banjarbaru, 10 Januari 2025  
Pengirim  
Kepala Balai KIPM  
Banjarmasin,



**Ditandatangani**  
**Secara Elektronik**

Nama Lengkap  
Diterima

Hafit Rahman

tanggalNo. Hp



**KEMENTERIAN  
KELAUTAN DAN PERIKANAN**

# LAPORAN KINERJA TAHUN 2024



## **BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN BANJARMASIN**

Jl. A. Yani 29,4 Guntung Manggis,  
Kec. Landasan Ulin, Kota Banjarbaru

Kalimantan Selatan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

# KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Banjarmasin (LKj Balai KIPM Banjarmasin) Tahun 2024 disusun sebagai wujud pertanggungjawaban Balai KIPM Banjarmasin dalam penggunaan anggaran yang akuntabel untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan. Di dalam laporan ini diuraikan informasi terkait sasaran strategis organisasi dan indikator keberhasilannya dalam rangka pencapaian visi dan misinya.

Landasan penyusunan laporan ini adalah Perjanjian Kinerja dan Rencana Aksi Balai KIPM Banjarmasin Tahun 2024. Secara umum, pada tahun 2024 beberapa target indikator kinerja yang ditetapkan telah dicapai dengan sangat baik.

Kami berharap laporan kinerja ini dapat bermanfaat sebagai sarana akuntabilitas dan pertanggungjawaban organisasi serta dapat dijadikan bahan masukan untuk peningkatan kinerja BPPMHKP di masa mendatang. Kami mengucapkan terimakasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan laporan kinerja ini.



Banjarmasin, 10 Januari 2025  
Kepala Balai KIPM Banjarmasin,  
Hafit Rahman, S.Pi, M.P

# DAFTAR ISI

	Halaman
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>ii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>iii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>iv</b>
<b>RINGKASAN EKSEKUTIF</b> .....	<b>v</b>
<b>BAB I. PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1 LATAR BELAKANG .....	1
1.2 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI .....	2
1.3 SASARAN, INDIKATOR DAN TARGET KINERJA .....	3
<b>BAB II AKUNTABILITAS KERJA</b> .....	<b>4</b>
2.1 CAPAIAN KINERJA .....	4
2.2 ANALISIS DAN EVALUASI .....	6
2.3 REALISASI ANGGARAN .....	17
<b>BAB III PENUTUP</b> .....	<b>19</b>
3.1 KESIMPULAN .....	19
3.2 REKOMENDASI .....	20
<b>BAB IV LAMPIRAN</b> .....	<b>21</b>
4.1 PERJANJIAN KINERJA .....	21
4.1 PENGHARGAAN.....	22



# DAFTAR GAMBAR

Nomor		Halaman
Gambar 1.	Struktur Organisasi Balai KIPM Banjarmasin .....	3
Gambar 2.	Dashboard capaian IK pada sistem aplikasi pengelolaan kinerja .....	4
Gambar 3.	Publikasi nilai IKM .....	11
Gambar 4.	Perjanjian Kinerja Balai KIPM Banjarmasin Tahun 2024 .....	21
Gambar 5.	Piagam Penghargaan Balai KIPM Banjarmasin Tahun 2024 .....	22

# DAFTAR TABEL

<b>Nomor</b>		<b>Halaman</b>
Tabel 1.	Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Balai KIPM Banjarmasin Tahun 2024 .....	5
Tabel 2.	Target dan Realisasi IK 1 pada Tahun 2024.....	6
Tabel 3.	Target dan Realisasi IK 2 pada Tahun 2024.....	7
Tabel 4.	Target dan Realisasi IK 3 pada Tahun 2024.....	8
Tabel 5.	Target dan Realisasi IK 4 pada Tahun 2024.....	9
Tabel 6.	Target dan Realisasi IK 5 pada Tahun 2024.....	10
Tabel 7.	Target dan Realisasi IK 6 pada Tahun 2024.....	11
Tabel 8.	Target dan Realisasi IK 7 pada Tahun 2024.....	12
Tabel 9.	Target dan Realisasi IK 8 pada Tahun 2024.....	13
Tabel 10.	Target dan Realisasi IK 9 pada Tahun 2024.....	14
Tabel 11.	Target dan Realisasi IK 10 pada Tahun 2024.....	15
Tabel 12.	Target dan Realisasi IK 11 pada Tahun 2024.....	15
Tabel 13.	Target dan Realisasi IK 12 pada Tahun 2024.....	16
Tabel 14.	Target dan Realisasi IK 13 pada Tahun 2024.....	16
Tabel 15.	Target dan Realisasi IK 14 pada Tahun 2024.....	17
Tabel 16.	Penyerapan Anggaran per Jenis Belanja Tahun 2024.....	18
Tabel 17.	Penyerapan Anggaran Berdasarkan Kegiatan Tahun 2024.....	18

# RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja (LKj) Tahunan Tahun 2024 merupakan bentuk laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kinerja Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan Banjarmasin selama Tahun 2024. Capaian kinerja (*performance results*) Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Banjarmasin tahun 2024 dibandingkan dengan Penetapan Kinerja (*performance agreement*) Tahun 2024 sebagai tolok ukur keberhasilan atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja. Secara umum, Balai KIPM Banjarmasin telah berhasil melaksanakan misi dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran dalam mendukung pembangunan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan selama Periode Tahun 2024.

Nilai pencapaian sasaran strategis (NPSS) Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Banjarmasin Tahun 2024 adalah sebesar **115,35%**. Nilai ini diperoleh dari pencapaian Sasaran Kinerja (SS) dan target Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Manajerial (IKU/IKM) Balai KIPM Banjarmasin yang telah ditetapkan dengan hasil sebagai berikut :

1. Pada awal tahun 2024 ditetapkan IKU/IKM Balai KIPM Banjarmasin berjumlah 16 (enam belas) yang terbagi dalam 3 (tiga) kegiatan yaitu :
  - a. Pengendalian Mutu
  - b. Kegiatan Standardisasi Sistem dan Kepatuhan
  - c. Dukungan Manajemen Internal Lingkup BPPMHKP
2. Pada bulan oktober 2024 terjadi perubahan indikator kinerja Balai KIPM Banjarmasin menjadi 14 (empat belas) yang terbagi dalam 3 (tiga) sasaran Kinerja yaitu :
  - a. Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan perikanan
  - b. Terselenggaranya Pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang konsisten sesuai standar
  - c. Terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang baik di lingkup Balai KIPM Banjarmasin
3. Uraian IK yang capaiannya memenuhi dan/atau melebihi target yang telah ditetapkan, yaitu:

**Sasaran Kegiatan 1. Terselenggaranya Pengendalian dan pengawasan Mutu hasil kelautan dan perikanan**

- IK.1 Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup Balai KIPM Banjarmasin (%)
- IK.2 Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup Balai KIPM Banjarmasin (%)
- IK.3 Persentase pengawasan mutu hasil perikanan di wilayah RI lingkup Balai KIPM Banjarmasin (%)
- IK.4 Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan yang diterima oleh negara tujuan ekspor lingkup Balai KIPM Banjarmasin (%)

**Sasaran Kegiatan 2. Terselenggaranya Pengendalian sistem jaminan Mutu hasil kelautan dan perikanan**

- IK.5 Nilai penumbuhan penerapan sistem manajemen mutu laboratorium penguji dan Lembaga inspeksi lingkup Balai KIPM Banjarmasin (%)

**Sasaran Kegiatan 3. Terselenggaranya Tata Kelola Pemerintah yang baik di Lingkup Balai KIPM Banjarmasin**

- IK.6 Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan Balai KIPM Banjarmasin (Indeks)
- IK.7 Indeks profesionalitas ASN lingkup Balai KIPM Banjarmasin (Indeks)
- IK.8 Nilai penilaian mandiri SAKIP lingkup Balai KIPM Banjarmasin (Nilai)
- IK.9 Nilai kinerja Perencanaan Anggaran (Nilai)
- IK.10 Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) lingkup Balai KIPM Banjarmasin (Nilai)
- IK.11 Penyelesaian temuan BPK lingkup Balai KIPM Banjarmasin (%)
- IK.12 Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Balai KIPM Banjarmasin (%)
- IK.13 Tingkat kepatuhan pengadaan barang/jasa lingkup Balai KIPM Banjarmasin (%)
- IK.14 Tingkat kepatuhan BMN lingkup Balai KIPM Banjarmasin (%)

Pagu anggaran sebesar Rp. 5.811.122.000,- (*lima milyar delapan ratus sebelas juta seratus dua puluh dua ribu rupiah*). Realisasi penyerapan anggaran Balai KIPM Banjarmasin pada Tahun 2024 mencapai Rp 5.766.260.929,- (*lima milyar tujuh ratus enam puluh enam juta dua ratus enam puluh ribu Sembilan ratus dua puluh Sembilan rupiah*) atau sebesar 99,23 %.

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### 1.1. LATAR BELAKANG

Sesuai dengan Peraturan Presiden RI Nomor 193 Tahun 2024 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan BPPMHKP mempunyai tugas menyelenggarakan pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, BPPMHKP dituntut untuk melaksanakan secara prudent, transparan, akuntabel, efektif dan efisien sesuai dengan prinsip-prinsip good governance, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Salah satu asas penyelenggaraan good governance adalah asas akuntabilitas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Akuntabilitas tersebut salah satunya diwujudkan dalam bentuk penyusunan laporan kinerja.

Laporan kinerja disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban Balai KIPM Banjarmasin dalam melaksanakan tugas dan fungsi pada tahun 2024 untuk mencapai visi dan misi BPPMHKP. Di samping itu, juga sebagai alat kendali dan pemacu peningkatan kinerja setiap satuan kerja di lingkungan BPPMHKP serta sarana untuk mendapatkan masukan bagi stakeholder demi perbaikan kinerja BPPMHKP Banjarmasin. Selain untuk memenuhi prinsip akuntabilitas. Laporan Kinerja tersebut juga merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Kinerja Organisasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

## **1.2. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI**

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, BPPMHKP mempunyai tugas menyelenggarakan pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan. Dalam melaksanakan tugasnya, BPPMHKP menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan;
- b. pelaksanaan pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan;
- c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan;
- d. pelaksanaan administrasi Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi BPPMHKP, Kepala Balai KIPM Banjarmasin dibantu oleh 1 Pejabat Struktural yaitu Kepala Sub Bagian Umum (Tim Kerja Dukungan Manajerial), dan 3 Tim Kerja yaitu Pengendalian dan Pengawasan Mutu produksi Primer, Pengendalian dan Pengawasan Mutu Pascapanen, Manajemen Mutu.

Jumlah SDM aparatur yang mendukung Balai KIPM Banjarmasin sejumlah 15 pegawai yang terdiri dari 2 pegawai pejabat struktural, 4 pegawai fungsional inspektur mutu, 3 pegawai fungsional asisten inspektur mutu, 2 pegawai analis pengelola keuangan APBN ahli pertama dan muda, 1 pegawai fungsional umum penelaah teknis kebijakan, 1 pengadministrasi umum, dan 2 Pegawai PPPK serta dibantu oleh 11 Orang Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) dan 1 orang PJLP. Distribusi

pegawai yang berimbang ini diperlukan dalam membentuk *workforce* yang efektif dan efisien meskipun masih belum memenuhi jumlah SDM ideal seperti tercantum dalam Peta Jabatan Tahun 2024.

Struktur organisasi Balai KIPM Banjarmasin dapat dilihat dalam Gambar 1.



Gambar 1. Struktur Organisasi Balai KIPM Banjarmasin

### 1.3. SASARAN, INDIKATOR DAN TARGET KINERJA

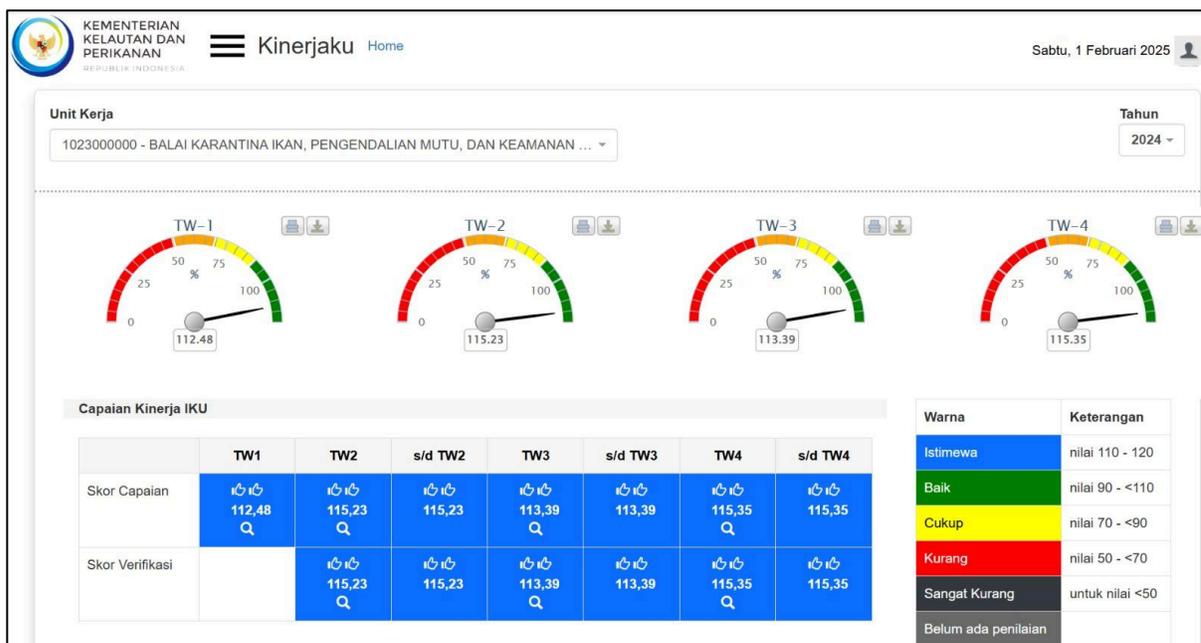
Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Dalam sasaran telah ditetapkan indikator sasaran sebagai ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun bersangkutan berdasarkan target yang ditetapkan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam rencana strategis.

# BAB 2

## AKUNTABILITAS KINERJA

### 2.1 CAPAIAN KINERJA

Capaian kinerja Balai KIPM Banjarmasin pada tahun 2024 masuk dalam kategori “Istimewa”, hal ini ditandai dengan capaian Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) sebesar **115.35%** berdasarkan pelaporan melalui sistem aplikasi pengelolaan kinerja di [www.kinerjaku.kkp.go.id](http://www.kinerjaku.kkp.go.id).



Gambar 2. Dashboard capaian IK pada sistem aplikasi pengelolaan kinerja

**Tabel 1.** Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Balai KIPM Banjarmasin Tahun 2024

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET 2024	REALISASI 2024
SK.1	Terselenggaranya Pengendalian dan pengawasan Mutu hasil kelautan dan perikanan	1	Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup Balai KIPM Banjarmasin (%)	70	100
		2	Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup Balai KIPM Banjarmasin (%)	70	100
		3	Persentase pengawasan mutu hasil perikanan di wilayah RI lingkup Balai KIPM Banjarmasin (%)	70	100
		4	Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan yang diterima oleh negara tujuan ekspor lingkup Balai KIPM Banjarmasin (%)	99	100
SK.2	Terselenggaranya Pengendalian sistem jaminan Mutu hasil kelautan dan perikanan	5	Nilai pemenuhan penerapan sistem manajemen mutu laboratorium pengujian dan Lembaga inspeksi lingkup Balai KIPM Banjarmasin (%)	70	86,48
SK3.1	Terselenggaranya Tata Kelola Pemerintah yang baik di Lingkup Balai KIPM Banjarmasin	6	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan Balai KIPM Banjarmasin (Indeks)	3,36	3,92
		7	Indeks Profesionalitas ASN lingkup Balai KIPM Banjarmasin (Indeks)	86	90,54
		8	Nilai penilaian mandiri SAKIP lingkup Balai KIPM Banjarmasin (Nilai)	82	83,40
		9	Nilai kinerja Perencanaan Anggaran (Nilai)	71	95,00
		10	Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) lingkup Balai KIPM Banjarmasin (Nilai)	93,76	97,68
		11	Penyelesaian temuan BPK lingkup Balai KIPM Banjarmasin (%)	100	100
		12	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Balai KIPM Banjarmasin (%)	80	100
		13	Tingkat kepatuhan pengadaan barang/jasa lingkup Balai KIPM Banjarmasin (%)	80	84,34
		14	Tingkat kepatuhan BMN lingkup Balai KIPM Banjarmasin (%)	80	97,50

## 2.2. ANALISIS DAN EVALUASI

**Sasaran Kegiatan 1 : Terselenggaranya Pengendalian dan pengawasan mutu Hasil Kelautan Perikanan.**

### **IK 1. Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup Balai KIPM Banjarmasin (%)**

Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor primer yang memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan adalah ukuran dalam menilai seberapa besar volume atau jumlah produk hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer perikanan budidaya meliputi Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB), Cara Pembenihan Ikan yang Baik (CPIB), Cara Pembuatan Pakan Ikan yang Baik (CPPIB), Cara Pembuatan Obat Ikan yang Baik (CPOIB), Cara Distribusi Obat Ikan yang Baik (CDOIB) dan perikanan tangkap meliputi Cara Penanganan Ikan yang Baik (CPIB) di kapal yang telah sesuai dengan standar, kriteria keamanan pangan yang ditetapkan oleh Otoritas Kompeten.

Standar Mutu dan Keamanan Pangan Hasil Kelautan dan Perikanan dicapai melalui penerapan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan. Sektor produksi perikanan primer merujuk kepada kegiatan yang berfokus pada pengambilan dan pengelolaan sumberdaya hayati perairan yang meliputi penangkapan ikan, budidaya dan pengumpulan hasil laut lainnya. Standar Mutu dan Keamanan Pangan Hasil Kelautan dan Perikanan mengacu kepada Standar Nasional Indonesia (SNI) dan Standar lainnya yang dipersyaratkan perdagangan dalam negeri atau luar negeri sesuai ketentuan yang berlaku.

Output kegiatan berupa rekomendasi yang diberikan dari hasil inspeksi dalam sistem OSS maupun secara manual.

Pada tahun 2024 Indikator Kinerja Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup Balai KIPM Banjarmasin di targetkan 70 %, pada tahun 2024 terealisasi 100 % dengan Capaian 142,86%.

**Tabel 2.** Target dan Realisasi IK 1 pada Tahun 2024

INDIKATOR KINERJA	TAHUN					TAHUN 2024			RENSTRA 2020-2024	
	2019	2020	2021	2022	2023	TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI
Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup Balai KIPM Banjarmasin (%)	-	-	-	-	-	70	100	142,86	-	-

## IK 2. Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup Balai KIPM Banjarmasin (%)

Presentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Pasca Panen yang memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan adalah ukuran dalam menilai seberapa besar volume atau jumlah produk hasil kelautan dan perikanan sektor Produksi Pasca Panen meliputi PMMT/HACCP dan Sertifikat Kelayakan Pengolahan (yang telah sesuai dengan standar kriteria keamanan pangan yang ditetapkan oleh Otoritas Kompeten)

Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan adalah upaya pencegahan dan pengendalian yang harus diperhatikan dan dilakukan sejak pra produksi sampai dengan pemasaran untuk menghasilkan hasil kelautan dan perikanan yang bermutu dan aman bagi kesehatan manusia. Standar Mutu dan Keamanan Pangan Hasil Kelautan dan Perikanan dicapai melalui penerapan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan.

Sektor produksi Pasca Panen merujuk kepada rangkaian kegiatan yang dilakukan setelah ikan atau hasil perikanan ditangkap dengan tujuan untuk meningkatkan nilai menjaga kualitas memperpanjang umur simpan produk perikanan yang meliputi Penanganan Pengolahan Distribusi hingga pemasaran produk perikanan Standar Mutu dan Keamanan Pangan Hasil Kelautan dan Perikanan mengacu kepada:

1. Standar Nasional Indonesia (SNI)
2. Standar Internasional (Codex Alimentarius)
3. Standar lainnya yang dipersyaratkan perdagangan dalam negeri atau luar negeri sesuai ketentuan yang berlaku.

Sertifikat Penerapan PMMT/HACCP dan SKP yang diterbitkan berdasarkan ruang lingkup produk jenis olahan ikan, unit proses, dan/atau potensi bahaya yang berbeda yang ditangani dan/atau diolah.

**Tabel 3.** Target dan Realisasi IK 2 pada Tahun 2024

INDIKATOR KINERJA	TAHUN					TAHUN 2024			RENSTRA 2020-2024	
	2019	2020	2021	2022	2023	TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI
Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup Balai KIPM Banjarmasin (%)	-	-	-	-	-	70	100	142,86	-	-

**IK 3. Persentase pengawasan mutu hasil perikanan di wilayah RI lingkup Balai KIPM Banjarmasin (%)**

Pengawasan mutu adalah semua kegiatan yang meliputi bimbingan fasilitasi pemantauan dan evaluasi terhadap mutu dan keamanan hasil perikanan.

Persentase pengawasan mutu hasil perikanan di wilayah RI merupakan nilai Pengawasan Mutu hasil Kelautan Perikanan di wilayah RI yang meliputi pengawasan implementasi dari terbitnya Inpres 01 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat dan melalui monitoring terhadap cemaran marine biotoksin dan/ atau cemaran kimia berbahaya yang berdampak pada mutu hasil KP.

Lokasi dari kegiatan Pengawasan ini dilakukan di Kabupaten / Kota yang konsumsi ikannya tinggi dengan lokus adalah Pasar moderen Pasar Tradisional Supplier, TPI/PPI yang produk ikannya dikonsumsi oleh masyarakat lokal /domestik. Melalui pengawasan penilaian sarana prasarana dan pengujian sampel produk perikanan dengan parameter uji Organoleptik mikrobiologi kimia dan bahan berbahaya dan parameter uji lain yang diperlukan dan Lokasi wilayah Perairan /Pelabuhan Perikanan di wilayah Republik Indonesia yang dilakukan monitoring terhadap ikan dan/ atau hasil perikanan yang menjadi sumber bahan baku Industri maupun konsumsi domestik yang bebas dari cemaran marine biotoksin dan cemaran kimia berbahaya.

**Tabel 4.** Target dan Realisasi IK 3 pada Tahun 2024

INDIKATOR KINERJA	TAHUN					TAHUN 2024			RENSTRA 2020-2024	
	2019	2020	2021	2022	2023	TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI
Persentase pengawasan mutu hasil perikanan di wilayah RI lingkup Balai KIPM Banjarmasin (%)	-	-	-	-	-	70	100	142,86	-	-

**IK 4. Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan yang diterima oleh negara tujuan ekspor lingkup Balai KIPM Banjarmasin (%)**

Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan yang diterima oleh negara tujuan ekspor merujuk pada perbandingan antara jumlah ikan dan hasil perikanan yang disertifikasi jumlah HC yang terbit dan volume yang diekspor ke pasar internasional dan penolakan terhadap produk ikan dan hasil perikanan oleh negara tujuan ekspor (HC yang ditolak oleh negara tujuan ekspor).

Pengiriman ikan dan hasil perikanan yang diekspor telah memenuhi persyaratan mutu dan keamanan hasil perikanan serta tidak dilakukan penolakan oleh negara tujuan ekspor Rasio ini penting

untuk memahami bagaimana sektor perikanan memberikan kontribusi terhadap perekonomian khususnya perdagangan internasional.

Sertifikat Kesehatan (*Health Certificate*) adalah sertifikat yang menyatakan bahwa ikan dan hasil perikanan telah memenuhi persyaratan mutu dan keamanan untuk konsumsi manusia dan Bukti pengiriman hasil perikanan yang telah memenuhi persyaratan adalah diterimanya Sertifikat Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan.

**Tabel 5.** Target dan Realisasi IK 4 pada Tahun 2024

INDIKATOR KINERJA	TAHUN					TAHUN 2024			RENSTRA 2020-2024	
	2019	2020	2021	2022	2023	TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI
Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan yang diterima oleh negara tujuan ekspor lingkup Balai KIPM Banjarmasin (%)	-	-	-	-	-	99	100	101	-	-

**Sasaran Kinerja 2. Terselenggaranya Pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang konsisten sesuai standar**

**IK.5 Nilai pemenuhan penerapan sistem manajemen mutu Laboratorium penguji dan Lembaga inspeksi lingkup Balai KIPM Banjarmasin (%)**

Nilai pemenuhan penerapan sistem manajemen mutu laboratorium penguji dan Lembaga inspeksi merupakan hasil penilaian dari evaluasi terhadap laboratorium dalam mematuhi standar mutu yang berlaku yang mengacu pada ISO/IEC 17025 dan ISO/IEC 17020 dan dinyatakan dalam bentuk presentase berdasarkan Tingkat kesesuaian terhadap kriteria yang telah ditetapkan dalam standar tersebut. Skor tinggi menunjukkan bahwa laboratorium telah memenuhi atau mendekati pemenuhan terhadap standar sistem manajemen mutu, sedangkan skor rendah menunjukkan adanya kelemahan dalam penerapan sistem manajemen mutu yang perlu diperbaiki.

Pada tahun 2024 IK Nilai pemenuhan penerapan sistem manajemen mutu Laboratorium penguji dan Lembaga inspeksi lingkup Balai KIPM Banjarmasin ditargetkan sebesar 70%, pada Tahun 2024 terealisasi 100% dan capaian 142,86%. Sehingga lingkup Balai KIPM Banjarmasin masih dapat mempertahankan status akreditasi sebagai Laboratorium penguji dan Lembaga Inspeksi.

**Tabel 6.** Target dan Realisasi IK 5 pada Tahun 2024

INDIKATOR KINERJA	TAHUN					TAHUN 2024			RENSTRA 2020-2024	
	2019	2020	2021	2022	2023	TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI

Nilai pemenuhan penerapan sistem manajemen mutu Laboratorium pengujian dan Lembaga inspeksi lingkup Balai KIPM Banjarmasin (%)	-	-	-	-	-	70	86,48	123,54	-	-
--	---	---	---	---	---	----	-------	--------	---	---

### Sasaran Kinerja 3. Terselenggaranya Tata Kelola Pemerintahan yang baik di Lingkup Balai KIPM Banjarmasin

#### IK.6 Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan Balai KIPM Banjarmasin (Indeks)

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik terutama di lingkup Balai KIPM Banjarmasin. Pengukuran Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) di Unit Pelaksana Teknis (UPT) lingkup Balai KIPM Banjarmasin menggunakan elektronik SKM (e-survey SKM), masyarakat/pengguna jasa untuk dapat menyatakan persepsi atas kepuasan layanan dapat mengakses Aplikasi Survey Kepuasan Masyarakat dengan alamat: <http://ptsp.kkp.go.id/skm/s/u/40>. Aplikasi yang terdapat di web tersebut dapat di akses oleh kepada pengguna jasa di masing masing UPT KKP. Daftar pertanyaan survey terdiri atas 9 unsur pertanyaan berupa Persyaratan; Sistem; Prosedur; Waktu Pelayanan; Biaya/Tarif; Produk Spesifikasi; Kompetensi Pelaksana; Perilaku Pelaksana; Penanganan Pengaduan; dan Sarana.

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dapat menjadi bahan penilaian terhadap unsur pelayanan yang masih perlu perbaikan dan menjadi pendorong setiap unit penyelenggara pelayanan untuk meningkatkan kualitas pelayanannya. Mengingat jenis pelayanan sangat beragam dengan sifat dan karakteristik yang berbeda, maka untuk memudahkan penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat (SKM) unit pelayanan memerlukan pedoman umum yang digunakan sebagai acuan untuk mengetahui kinerja pelayanan publik di lingkungan instansi masing-masing.

Dalam rangka mengevaluasi kinerja pelayanan publik, Balai KIPM Banjarmasin mengacu pada Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman Umum Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Hasil yang ingin dicapai dari Survei Kepuasan Masyarakat adalah perbaikan pelayanan kepada masyarakat melalui Penataan sistem, mekanisme dan prosedur pelayanan, sehingga pelayanan dapat dilaksanakan secara lebih berkualitas, berdaya guna dan berhasil guna dan tumbuhnya kreativitas, prakarsa dan peran serta masyarakat dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.

Pada Tahun 2024 nilai IKM Balai KIPM Banjarmasin mencapai 3,92 dengan kategori “SANGAT BAIK”, Realisasi Indikator Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Layanan Publik (nilai) lingkup Balai KIPM Banjarmasin pada Tahun 2024 telah melebihi target triwulan yang ditetapkan yaitu 3,36.

**Tabel 7.** Target dan Realisasi IK 6 pada Tahun 2024

INDIKATOR KINERJA	TAHUN					TAHUN 2024			RENSTRA 2020-2024	
	2019	2020	2021	2022	2023	TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI
Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan Balai KIPM Banjarmasin (Indeks)	-	-	-	-	-	3,36	3,92	116	-	-

Tabel Rekapitulasi Nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)  
Unit Pelayanan BPPMHKP Triwulan IV Tahun 2024

No.	UPT	Jumlah Responden	Nilai IKM (Rata-rata/ unsur)	SKM	Mutu Pelayanan	Kinerja UPP
1	Balai KIPM Balikpapan	35	4.00	100	A	Sangat Baik
2	Balai KIPM Ambon	8	4.00	100	A	Sangat Baik
3	Stasiun KIPM Padang	6	4.00	100	A	Sangat Baik
4	Balai KIPM Jayapura	4	4.00	100	A	Sangat Baik
5	Stasiun KIPM Tahuna	4	4.00	100	A	Sangat Baik
6	Stasiun KIPM Ternate	86	3.99	99.74	A	Sangat Baik
7	Stasiun KIPM Pekanbaru	72	3.93	98.34	A	Sangat Baik
8	Stasiun KIPM Mamuju	7	3.92	98.02	A	Sangat Baik
9	Balai KIPM Banjarmasin	32	3.92	98	A	Sangat Baik
10	Stasiun KIPM Luwuk Banggai	36	3.92	97.99	A	Sangat Baik
11	Balai KIPM Mataram	23	3.91	97.71	A	Sangat Baik
12	Stasiun KIPM Pontianak	60	3.91	97.69	A	Sangat Baik
13	Stasiun KIPM Yogyakarta	13	3.90	97.44	A	Sangat Baik

Gambar 3. Publikasi nilai IKM

#### IK 7. Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Balai KIPM Banjarmasin (Indeks)

Profesionalitas adalah kualitas para anggota profesi terhadap profesinya serta derajat pengetahuan dan keahlian yang mereka miliki untuk melakukan tugas-tugasnya. Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan (PermenPAN dan RB No.38 Tahun 2018). Nilai Indeks Profesionalitas ASN merupakan gambaran kualitas profesionalitas ASN KKP yang diukur setiap tahun oleh Biro SDMA, Sekretariat Jenderal dengan mengacu pada Peraturan Menteri PAN dan RB No. 38 Tahun 2018 tentang Peraturan Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara.

Formula menghitung capaian indikator indeks profesionalitas ASN diukur dengan menggunakan 4 (empat) dimensi, meliputi : kualifikasi, kompetensi, kinerja dan disiplin. Realisasi indikator indeks profesionalitas ASN lingkup Balai KIPM Banjarmasin (Indeks) bersifat semesteran. Dalam IK Tahun 2024 telah terealisasi dengan nilai 90.54 pada Tahun 2024 dan melebihi dari target yang ditetapkan yaitu 86.

**Tabel 8.** Target dan Realisasi Indikator Kinerja 9 pada Tahun 2024

INDIKATOR KINERJA	TAHUN					TAHUN 2024			RENSTRA 2020-2024	
	2019	2020	2021	2022	2023	TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI
Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Balai KIPM Banjarmasin (Indeks)	60	72	73	83	84	86	90,54	105	86	86

#### IK 8. Nilai Penilaian Mandiri SAKIP lingkup Balai KIPM Banjarmasin (Nilai)

Salah satu Rekomendasi Kemen PAN & RB dari hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Tahun 2020 yakni "Meningkatkan kualitas evaluasi akuntabilitas agar lebih menggambarkan tingkat akuntabilitas unit kerja yang dievaluasi dan memastikan rekomendasi hasil evaluasi tersebut ditindak lanjuti dan dapat dimanfaatkan sebagai umpan balik (*feedback*) perbaikan perencanaan kinerja, penerapan manajemen kinerja, dan peningkatan capaian kinerja unit kerja secara berkelanjutan".

Untuk pencapaian hasil penilaian Inspektorat Jenderal sesuai Lembar Kerja Evaluasi (LKE) berdasarkan PERMENPAN RB Nomor 53 Tahun 2024 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Hasil evaluasi/Rekonsiliasi Kinerja yang dilakukan Biro Perencanaan (*Rapid Assesement*) akan melengkapi keterbatasan yang dimiliki Inspektorat Jenderal dengan harapan KKP memiliki gambaran kualitas implementasi SAKIP secara menyeluruh di seluruh Unit Kerja, masih terdapat beberapa kekurangan terkait redaksi pada dokumen dokumen SAKIP Balai KIPM Banjarmasin yang disampaikan baik melalui Gdrive, LKE Aplikasi E kinerjaku KKP dan Aplikasi ESR Menpan.

Penilaian indikator nilai SAKIP Balai KIPM Banjarmasin dilakukan oleh Sekretariat BPPMHKP yang dilaksanakan secara mandiri dengan menggunakan Kertas Kerja Hasil Rekonsiliasi untuk menilai aspek perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal dengan target nilai SAKIP Balai KIPM Banjarmasin Tahun 2024 adalah 82 dan dapat tercapai dengan mendapatkan nilai akuntabilitas 83,40 dengan Predikat A berdasarkan LKE penilaian mandiri Eselon 1.

**Tabel 9.** Target dan Realisasi IK 10 pada Tahun 2024

INDIKATOR KINERJA	TAHUN					TAHUN 2024			RENSTRA 2020-2024	
	2019	2020	2021	2022	2023	TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI
Nilai penilaian mandiri SAKIP lingkup Balai KIPM Banjarmasin (Nilai)	85	85	85	85	85	82	83,40	101	82	82

#### IK 9. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Lingkup Balai KIPM Banjarmasin (Nilai)

Nilai kinerja anggaran adalah proses menghasilkan suatu nilai capaian kinerja untuk setiap indikator yang dilakukan dengan membandingkan data realisasi dengan target yang telah direncanakan sebelumnya. Permasalahan terkait pemahaman integritasi antara web berbasis MONEV/SMART kemenkeu dan penerapan aplikasi SAKTI yang diperlukan keselarasan dari semua pengguna aplikasi SAKTI agar data yang dihasilkan dapat tercapai sesuai dengan target dan timeline

Untuk menunjang Nilai Kinerja Anggaran dengan membandingkan data realisasi dengan target yang telah direncanakan sebelumnya dengan controlling secara berkala, dan memperhatikan sosialisasi atau arahan dari tim kinerja BPPMHKP untuk pemenuhan nilai, sehingga capaian realisasi dapat tercapai sesuai yang ditetapkan.

Target yang ditetapkan pada indikator nilai kinerja anggaran Balai KIPM Banjarmasin tahun 2024 adalah 71 dan pada periode Tahun 2024 dapat terealisasi dengan Nilai 95.

**Tabel 10.** Target dan Realisasi IK 9 pada Tahun 2024

INDIKATOR KINERJA	TAHUN					TAHUN 2024			RENSTRA 2020-2024	
	2019	2020	2021	2022	2023	TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI
Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Lingkup Balai KIPM Banjarmasin (Nilai)	87	88	86	81	82	71	95	133	82	82

#### IK 10. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup Balai KIPM Banjarmasin (Nilai)

Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran ini merupakan sebagai alat ukur untuk menentukan tingkat kinerja satker khususnya dalam pelaksanaan anggaran. pengukuran kinerja pelaksanaan anggaran yang dilakukan dengan menggunakan variabel-variabel yang terkait dengan pelaksanaan anggaran sebagai indikatornya, yaitu Kualitas Perencanaan Anggaran yang terdiri dari (Revisi DIPA dan

Deviasi Halaman III DIPA), Kualitas Pelaksanaan Anggaran yang terdiri dari (Penyerapan Anggaran, Belanja Kontraktual, Penyelesaian Tagihan, Pengelolaan UP dan TUP, Dispensasi SPM), Kualitas Pelaksanaan Anggaran yang terdiri dari (Capaian Output), pada tahun 2024 masih terdapat kelemahan pada indikator Deviasi halaman III DIPA terkait dengan penyampaian dan pelaksanaan Rencana Penarikan Dana (RPD).

Untuk menunjang Nilai IKPA yang akuntabilitas dan sesuai target sudah dilakukan monev internal tindaklanjut capaian masing-masing komponen dalam IKPA (8 Indikator) secara berkala setiap Bulan. Serta mempercepat pelaksanaan kegiatan dan Anggaran dengan dana yang tersedia dan selalu update untuk RPD yang mempengaruhi nilai pada indikator deviasi halaman III DIPA serta memantau kembali serapan anggaran agar sesuai target meskipun ada perubahan reja dengan nomenklatur organisasi yang baru

Target Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Lingkup Balai KIPM Banjarmasin tahun 2024 adalah 93,76. Realisasi indikator nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) lingkup Balai KIPM Banjarmasin dapat dicapai melebihi target yang ditetapkan dengan nilai 97,68.

**Tabel 11.** Target dan Realisasi IK 10 pada Tahun 2024

INDIKATOR KINERJA	TAHUN					TAHUN 2024			RENSTRA 2020-2024	
	2019	2020	2021	2022	2023	TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI
Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup Balai KIPM Banjarmasin (Nilai)	-	88	89	89	93,75	93,76	97,68	104	93,76	93,76

#### IK 11. Penyelesaian Temuan BPK Lingkup Balai KIPM Banjarmasin (%)

Nilai temuan atas laporan keuangan yang ditampilkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas LK BPPMHKP merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintah, kecukupan pengungkapan (*adequate disclosure*), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern.

Untuk menunjang kinerja yang cepat dan transparan sudah dilakukan penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan (LK) tepat waktu, dan mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) serta evaluasi secara terus menerus tentang update Aplikasi terbaru dari Kementerian Keuangan (SAKTI) dan update penataan dokumen keuangan agar rapi dan mudah tertelusur.

Persentase penyelesaian temuan BPK atas laporan keuangan TA.2024 (*Audited*) target 100% dengan target Tahunan, dan dapat terealisasi 100% tanpa nilai temuan dari BPK sampai akhir Tahun Anggaran 2024.

**Tabel 12.** Target dan Realisasi IK 11 pada Tahun 2024

INDIKATOR KINERJA	TAHUN					TAHUN 2024			RENSTRA 2020-2024	
	2019	2020	2021	2022	2023	TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI
Penyelesaian Temuan BPK Lingkup Balai KIPM Banjarmasin (%)	1%	1%	-	≤1	100	100	100	100	100	100

### IK 12. Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Balai KIPM Banjarmasin (%)

Untuk menunjang kinerja yang cepat dan transparan tetap dilakukan pengawasan dan pengendalian internal dengan memperhatikan rekomendasi pada kegiatan pengawasan sebelumnya atau hasil uji pada eselon 1 dengan hasil Tindak Lanjut **TUNTAS** pada aplikasi SIDAK KKP, serta memperhatikan regulasi-regulasi terbaru.

Target persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Balai KIPM Banjarmasin pada Tahun 2024 adalah target 80% dengan realisasi mencapai 100% lebih dari yang ditetapkan.

**Tabel 13** Target dan Realisasi IK 12 pada Tahun 2024

INDIKATOR KINERJA	TAHUN					TAHUN 2024			RENSTRA 2020-2024	
	2019	2020	2021	2022	2023	TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI
Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Balai KIPM Banjarmasin (%)	-	82	65	70	75	80	100	100	80	80

### IK 13. Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa BPPMHKP Lingkup Balai KIPM Banjarmasin (%)

Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Lingkup Balai KIPM Banjarmasin merupakan ukuran yang menggambarkan tingkat kepatuhan dalam Pengadaan Barang/Jasa lingkup Balai KIPM Banjarmasin telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sehingga perlu adanya pemahaman dan kelengkapan dokumen untuk keperluan tata kelola pengadaan barang dan jasa agar sewaktu dilakukan penilaian dapat memperoleh hasil yang sesuai target dengan ketetapan waktu dalam pemenuhan dokumen.

Untuk menunjang Nilai Tingkat kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa dengan membandingkan data realisasi dengan target yang telah direncanakan sebelumnya dengan kontroling secara berkala pada aplikasi SIRUP/LPSE dan 6 Indikator lainnya yang tertuang dalam surat inspektorat jenderal KKP hasil pengawasan Tata Kelola Pengadaan Barang/Jasa. Target yang ditetapkan pada indikator Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Lingkup Balai KIPM Banjarmasin tahun 2024 adalah 80 dan realisasi mencapai 84,34.

**Tabel 14.** Target dan Realisasi IK 13 pada Tahun 2024

INDIKATOR KINERJA	TAHUN					TAHUN 2024			RENSTRA 2020-2024	
	2019	2020	2021	2022	2023	TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI
Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa BPPMHKP Lingkup Balai KIPM Banjarmasin (%)	-	-	-	75	77,5	80	84,34	105	80	80

#### IK 14. Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Lingkup Balai KIPM Banjarmasin

Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN BPPMHKP Lingkup Balai KIPM Banjarmasin merupakan ukuran yang menggambarkan tingkat kepatuhan dalam pengelolaan BMN lingkup Balai KIPM Banjarmasin telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Tingkat kepatuhan pengelolaan BMN Unit Eselon II diukur berdasarkan jumlah nilai dari beberapa unsur berikut yaitu Tingkat pemanfaatan Rencana Kebutuhan BMN (RKBMN) Tahun 2022 (bobot 10%), tersedianya usulan penetapan status penggunaan BMN untuk pengadaan belanja modal hingga triwulan 4 tahun 2022 baik ke pengguna barang dan pengelola barang (bobot 25%), tingkat penyelesaian inventarisasi dan penilaian kembali (revaluasi aset) Tahun 2017-2021 (bobot 20%), pemanfaatan BMN hasil pengadaan belanja modal tahun 2024 di dukung Berita Acara Serah Terima (BAST)/ Berita Acara Pemakaian (bobot 25%) dan Penyusunan Laporan BMN (Semesteran dan Tahunan) secara tepat waktu dengan (bobot 20%).

Untuk menunjang Nilai tingkat kepatuhan dalam pengelolaan BMN dengan membandingkan data pelaksanaan yang sesuai target yang telah direncanakan sebelumnya dengan kontroling secara berkala pada indikator yang ditetapkan.

Target yang ditetapkan pada indikator Tingkat Kepatuhan pengelolaan BMN lingkup Balai KIPM Banjarmasin tahun 2024 pada Tahun adalah 80 dengan capaian realisasi mencapai 97,50.

**Tabel 15** Target dan Realisasi IKM 16 pada Tahun 2024

INDIKATOR KINERJA	TAHUN					TAHUN 2024			RENSTRA 2020-2024	
	2019	2020	2021	2022	2023	TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI
Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Lingkup Balai KIPM Banjarmasin	-	-	-	75	77,5	80	97,50	121	80	80

### 2.3 REALISASI ANGGARAN

Kinerja Keuangan Balai KIPM Banjarmasin pada Tahun 2024 melalui Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri serta Program Dukungan Manajemen dengan alokasi pagu anggaran sebesar Rp. 5.811.122.000,- (*lima milyar delapan ratus sebelas juta seratus dua puluh dua ribu rupiah*). Realisasi penyerapan anggaran Balai KIPM Banjarmasin pada Tahun 2024 mencapai Rp 5.766.260.929,- (*lima milyar tujuh ratus enam puluh enam juta dua ratus enam puluh ribu Sembilan ratus dua puluh Sembilan rupiah*) atau sebesar 99,23 %.

Alokasi anggaran Balai KIPM Banjarmasin pada tahun anggaran (T.A) 2024 adalah Rp. 5.811.122.000,- (*lima milyar delapan ratus sebelas juta seratus dua puluh dua ribu rupiah*) Anggaran ini terdiri dari Rupiah murni sebesar Rp 5.783.750.000,- (*lima milyar tujuh ratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah*) dan PNPB sebesar Rp 27.372.000,- (*dua puluh tujuh juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu rupiah*). Sampai Akhir Tahun 2024 realisasi penyerapan anggaran sumber dana RM Balai KIPM Banjarmasin mencapai Rp 5.746.242.995,- (*lima milyar tujuh ratus empat puluh enam juta dua ratus empat puluh dua ribu Sembilan ratus sembilan puluh lima rupiah*) atau sebesar 99,35 % sedangkan untuk sumber dana PNPB realisasi penyerapan anggaran mencapai Rp 20.017.934,- (*dua puluh juta tujuh belas ribu Sembilan ratus tiga puluh empat rupiah*) atau sebesar 73,13 %

Rekapitulasi penyerapan anggaran Balai KIPM Banjarmasin T.A 2024 berdasarkan jenis belanja dan jenis kegiatan disajikan pada Tabel 16 dan Tabel 17.

**Tabel 16.** Penyerapan Anggaran per Jenis Belanja pada Tahun 2024

NO	KODE/NAMA KEGIATAN	PAGU	REALISASI	SISA ANGGARAN	%
1	Pegawai	3.039.233.000	3.038.969.188	263.812	99.99
2	Barang	2.771.889.000	2.727.291.741	44.597.259	98.39
3	Modal	0	0	0	0
	<b>TOTAL</b>	<b>5.811.122.000</b>	<b>5.766.260.929</b>	<b>44.861.071</b>	<b>99.23</b>

**Tabel 17.** Penyerapan Anggaran Berdasarkan Kegiatan pada Tahun 2024

NO	KODE/NAMA KEGIATAN	PAGU	REALISASI	SISA ANGGARAN	%
1	3989/ Pengendalian Mutu	339.000.000	315.103.105	23.896.895	92.95
2	7010/Manajemen Mutu	116.000.000	106.691.573	9.308.427	91.98
3	3987 / Dukungan Manajemen Internal Lingkup Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	5.356.122.000	5.344.466.251	11.655.749	99.78
	<b>TOTAL</b>	<b>5.811.122.000</b>	<b>5.766.260.929</b>	<b>44.861.071</b>	<b>99.23</b>

# BAB 3

## PENUTUP

### 3.1 KESIMPULAN

Dari capaian-capaian yang telah dilaksanakan pada kinerja pada Tahun 2024 juga menjawab beberapa rekomendasi permasalahan dan kendala pada triwulan sebelumnya dalam Tahun 2024, diantaranya : Telah dilakukan Update berkelanjutan skema Rencana Penarikan Dana (RPD) sesuai jadwal dari Kementerian Keuangan RI secara berkala agar pelaksanaan kegiatan dapat terealisasi sesuai dengan rencana pada Halaman III DIPA. Serta melakukan evaluasi dan monitoring pelaksanaan pencapaian IK yang dilakukan setiap Bulan bertepatan dengan Rapat Bulanan oleh masing masing penanggung jawab kegiatan dan keuangan Balai KIPM Banjarmasin. Dan juga telah melakukan update kebutuhan formasi SDM kepada Biro SDMAO melalui Tim Sekretariat BPPMHKP pada acara kegiatan Forum Kepegawaian yang telah ditetapkan berupa Keputusan Menterei Kelautan dan Perikanan tentang Peta Jabatan lingkup KKP.

Laporan Kinerja (LKj) Balai KIPM Banjarmasin pada Tahun 2024 menyajikan keberhasilan capaian sasaran strategis Balai KIPM Banjarmasin pada periode kedua tahun anggaran 2024, yang tercermin dalam capaian Indikator Kinerja (IK). Terhadap capaian IK tersebut dilakukan perbandingan terhadap target triwulan dan target tahunan sebagai bahan analisis dan evaluasi lebih lanjut untuk menilai keberhasilan dalam perencanaan program dan kegiatan selama satu tahun anggaran. Secara umum, capaian sasaran strategis dan IK Balai KIPM Banjarmasin yang diperjanjikan telah tercapai sesuai rencana dan target yang ditetapkan. Namun demikian, terdapat beberapa kendala dan permasalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada Tahun 2024 dan akan selalu diperbaiki pada Tahun 2025, antara lain:

- i) Masih harus selalu update Rencana Penarikan Dana yang mempengaruhi Indikator deviasi Halaman III DIPA seiring dengan perubahan nomenklatur kelembagaan;
- ii) Mempersiapkan Perjanjian Kinerja yang baru untuk Tahun 2025 sesuai perubahan struktur organisasi tingkat eselon 1.

### **3.2 REKOMENDASI**

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja Balai KIPM Banjarmasin pada Tahun 2024, sebagai upaya peningkatan kinerja pada tahun berikutnya terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan dan ditindaklanjuti, sebagai berikut:

- i) Meningkatkan monitoring dan evaluasi kinerja secara periodik (bulanan dan triwulan) berdasarkan target IK serta rencana aksi yang telah disusun untuk mengawal pencapaian kinerja dari masing-masing kegiatan yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Balai KIPM Banjarmasin untuk Tahun 2025.
- ii) Tim Perencanaan dan Program agar terus melakukan Update skema Rencana Penarikan Dana (RPD) untuk setiap triwulan di Tahun 2025 sesuai jadwal dari Kementerian Keuangan RI agar pelaksanaan kegiatan dapat terealisasi sesuai dengan Rencana pada Halaman III DIPA dan langkah-langkah pelaksanaan kegiatan yang ditetapkan Kementerian Keuangan;
- iii) Menyiapkan dari awal perubahan susunan Tim pengelolaan manajemen Kinerja untuk tahun 2025 seiring dinamika berubahnya formasi jumlah pegawai pada Balai KIPM Banjarmasin.

# BAB 4

## LAMPIRAN

Perjanjian kinerja dan penghargaan yang diraih oleh Balai KIPM Banjarmasin selama tahun 2024.

### 4.1 PERJANJIAN KINERJA

**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**  
**BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU**  
**HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN**  
 JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16  
 JAKARTA 15115, KOTAK POS 4130, KIP 10041  
 TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3513282  
 LAMAN [www.kkp.go.id](http://www.kkp.go.id)

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024**  
**BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN**  
**HASIL PERIKANAN BANJARMASIN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Hafit Rahman**  
 Jabatan : Kepala Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Banjarmasin

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Ishartini**  
 Jabatan : Kepala Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 1 Oktober 2024

Pihak Kedua: Kepala Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (Ishartini)  
 Pihak Pertama: Kepala Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Banjarmasin (Hafit Rahman)

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024**  
**BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU, DAN KEAMANAN**  
**HASIL PERIKANAN BANJARMASIN**

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
SK.1 Terselenggaranya Pengendalian dan pengawasan mutu Hasil Kelautan Perikanan	1. Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup Balai KIPM Banjarmasin (%)	70
	2. Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup Balai KIPM Banjarmasin (%)	70
	3. Persentase pengawasan mutu hasil perikanan di wilayah RI lingkup Balai KIPM Banjarmasin (%)	70
	4. Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan yang diterima oleh negara tujuan ekspor lingkup Balai KIPM Banjarmasin (%)	99
SK.2 Terselenggaranya Pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang konsisten sesuai standar	5. Nilai pemenuhan penerapan sistem manajemen mutu laboratorium pengujian dan Lembaga inspeksi lingkup Balai KIPM Banjarmasin (%)	70
SK.3 Terselenggaranya Tata Kelola Pemerintahan yang baik di Lingkup Balai KIPM Banjarmasin	6. Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan Balai KIPM Banjarmasin (Indeks)	3,36
	7. Indeks Profesionalitas ASN lingkup Balai KIPM Banjarmasin (Indeks)	86
	8. Nilai penilaian mandiri SAKIP lingkup Balai KIPM Banjarmasin (Nilai)	82
	9. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran lingkup Balai KIPM Banjarmasin (Nilai)	71
	10. Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran (KPA) lingkup Balai KIPM Banjarmasin (Nilai)	93,76
	11. Penyelesaian temuan BPK lingkup Balai KIPM Banjarmasin (%)	100
	12. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimantapkan untuk Perbaikan Kinerja lingkup Balai KIPM Banjarmasin (%)	80
	13. Tingkat kepatuhan pengadaan barang/jasa lingkup Balai KIPM Banjarmasin (%)	80
	14. Tingkat kepatuhan BMN lingkup Balai KIPM Banjarmasin (%)	80

Data Anggaran

No	Kegiatan	Anggaran (Rp)
1.	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	5.271.970.000,-
2.	Manajemen Mutu	116.000.000,-
3.	Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	339.000.000,-
<b>Total Anggaran Balai KIPM Banjarmasin Tahun 2024</b>		<b>5.726.970.000,-</b>

Jakarta, 1 Oktober 2024

Pihak Kedua  
Kepala Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan  
*Ishartini*  
Ishartini

Pihak Pertama  
Kepala Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Banjarmasin  
*Hafti Rahman*  
Hafti Rahman

Gambar 4. Perjanjian Kinerja Balai KIPM Banjarmasin Tahun 2024

#### 4.2 PENGHARGAAN



Gambar 5. Piagam Penghargaan Balai KIPM Banjarmasin Tahun 2024